
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara)

Anye Ckristofer¹, Muhammad Kasim², Trisna Waty Riza Eryani³, Ahmad Yani⁴

Anye Ckristofer, anyeckristofer@mail.com, Universitas Widya Gama Mahakam

Muhammad Kasim, kasim@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam²

Trisna Waty Riza Eryani, trisnawaty@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam³

Ahmad Yani, ahmadyani@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam⁴

Abstract

Infrastructure development in the country's border area is one of the government's strategic efforts to improve people's welfare while strengthening state sovereignty. Long Nawang Village, Kayan Hulu District, Malinau Regency, North Kalimantan Province is one of the Indonesia-Malaysia border areas that still faces limited infrastructure, especially road access, education, health, and public service facilities. This study aims to find out the implementation of the country's border infrastructure development in improving community welfare and to find out the supporting and inhibiting factors for its implementation in Long Nawang Village. The research method used is qualitative descriptive research with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman interactive model which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the implementation of infrastructure development in Long Nawang Village has gone quite well and has a positive impact on the welfare of the community, especially in the fields of transportation, offices, social, economic, and production. However, there are still several obstacles such as difficult geographical conditions, limited access to transportation, and uneven infrastructure development throughout the village area. Abstract must be written in English with 11 pt Times new roman font, single spacing, justify which consists of 150—250 words explaining about research background, research aim, method, and conclusion.


Keywords: infrastructure development; border areas; community welfare; regional development;

Abstrak

Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan negara merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara. Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, terutama akses jalan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur perbatasan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di Desa Long Nawang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang telah berjalan

cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pada bidang perhubungan, perkantoran, sosial, ekonomi, dan produksi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti kondisi geografis yang sulit, keterbatasan akses transportasi, dan belum meratanya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah desa.

Kata kunci: pembangunan infrastruktur; kawasan perbatasan; kesejahteraan masyarakat; pembangunan daerah;

Received	:	03 Januari 2026
Accepted	:	12 Maret 2026
Published	:	13 Mei 2026
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada wilayah perbatasan negara yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas teritorial suatu negara, tetapi juga sebagai beranda depan negara yang mencerminkan tingkat pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pertahanan wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Salah satu wilayah strategis di kawasan tersebut adalah Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, yang menjadi pusat kegiatan strategis nasional di wilayah Apau Kayan. Namun demikian, kondisi infrastruktur di wilayah ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama pada akses transportasi, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta fasilitas administrasi pemerintahan. Akses menuju Desa Long Nawang masih sangat terbatas dan sebagian besar hanya dapat ditempuh menggunakan transportasi udara atau jalur darat dengan kondisi jalan yang belum memadai. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya harga kebutuhan pokok serta terbatasnya mobilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi.

Permasalahan infrastruktur di wilayah perbatasan memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui kebijakan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Upaya pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, salah satunya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020–2024. Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan agar tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritis, pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Menurut Rostow, pembangunan dipandang sebagai proses perubahan menuju masyarakat yang lebih maju. Sementara itu, pembangunan infrastruktur menurut Grigg merupakan penyediaan fasilitas dan struktur dasar yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur memiliki peran

penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, memperluas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, konsep kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan material, sosial, dan spiritual sehingga masyarakat dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan potensi dirinya.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial. Akan tetapi, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kondisi geografis yang sulit, keterbatasan anggaran, rendahnya aksesibilitas, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pembangunan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur perbatasan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur perbatasan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat serta menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara apa adanya.

Desain penelitian difokuskan pada pengkajian pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan yang meliputi infrastruktur perhubungan, perkantoran, sosial, ekonomi, dan produksi. Penelitian dilakukan di Desa Long Nawang yang merupakan

kawasan strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan menjadi salah satu wilayah prioritas pembangunan perbatasan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan. Informan penelitian terdiri dari Camat Kayan Hulu, Kepala Desa Long Nawang, Kepala Adat, tokoh masyarakat, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Perencanaan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta faktor pendukung dan penghambatnya. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi infrastruktur dan aktivitas masyarakat di wilayah penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa profil desa, laporan pembangunan, foto kegiatan, serta dokumen kebijakan terkait pembangunan kawasan perbatasan.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, serta interpretasi data secara langsung di lapangan.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL

3.1 Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat wilayah kedaulatan negara. Desa Long Nawang sebagai wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia memiliki posisi strategis karena menjadi pusat kegiatan pemerintahan Kecamatan Kayan Hulu sekaligus kawasan perbatasan negara. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya bertujuan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta konektivitas antarwilayah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang sudah mengalami perkembangan, walaupun masih terdapat beberapa keterbatasan terutama pada akses transportasi darat, kondisi geografis, serta keterbatasan fasilitas penunjang lainnya.

3.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis Desa Long Nawang

Desa Long Nawang berada di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia. Akses menuju desa masih tergolong sulit karena hanya dapat ditempuh melalui jalur udara menggunakan pesawat perintis atau jalur darat dengan waktu tempuh yang cukup lama tergantung kondisi cuaca dan medan jalan.

Jumlah penduduk Desa Long Nawang sebanyak 1.154 jiwa yang terdiri atas 582 laki-laki dan 572 perempuan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, sedangkan sebagian lainnya bekerja sebagai ASN, pedagang, penyedia jasa, serta anggota TNI/Polri.

Table 1. Data Penduduk Desa Long Nawang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	582
2	Perempuan	572
	Total	1.154

Sumber: Profil Desa Long Nawang Tahun 2023



Figure 1. Kondisi Wilayah Desa Long Nawang sebagai Kawasan Perbatasan

3.2 Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

Pembangunan infrastruktur perhubungan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena akses transportasi masih menjadi kendala utama masyarakat Desa Long Nawang. Jalan penghubung antardaerah sebagian besar masih berupa jalan bekas perusahaan kayu dan belum sepenuhnya memadai untuk mobilitas masyarakat.

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan dan jembatan mulai dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, keberadaan akses udara menggunakan pesawat perintis sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi dan distribusi barang.

3.2.1 Infrastruktur Jalan dan Transportasi

Pembangunan jalan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas masyarakat dengan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Namun demikian, kondisi medan yang berat serta cuaca ekstrem sering menjadi hambatan dalam pembangunan maupun pemeliharaan jalan.

Table 2. Kondisi Infrastruktur Desa Long Nawang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Jalan Aspal	1 Km
2	Kantor Camat	1 Unit
3	Kantor Desa	1 Unit
4	PLBN Long Nawang	1 Unit
5	UPTD Puskesmas	1 Unit

Sumber: Profil Desa Long Nawang Tahun 2023



Figure 2. Infrastruktur Jalan dan Sarana Transportasi Desa Long Nawang

3.3 Pembangunan Infrastruktur Sosial

Pembangunan infrastruktur sosial meliputi pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menyediakan fasilitas pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA serta fasilitas kesehatan berupa UPTD Puskesmas.

Keberadaan fasilitas sosial tersebut membantu masyarakat memperoleh pelayanan dasar tanpa harus selalu menuju ibu kota kabupaten.

3.3.1 Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat menilai pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan cukup membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun

demikian, keterbatasan tenaga pengajar, tenaga kesehatan, dan fasilitas pendukung masih menjadi kendala dalam pelayanan.

Table 3. Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	PAUD	1 Unit
2	Sekolah Dasar	1 Unit
3	SMP	1 Unit
4	SMA	1 Unit
5	Puskesmas	1 Unit

Sumber: Profil Desa Long Nawang Tahun 2023



Figure 3. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Desa Long Nawang

3.4 Pembangunan Infrastruktur Ekonomi

Pembangunan infrastruktur ekonomi bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur ekonomi yang tersedia meliputi pasar, akses distribusi barang, jaringan listrik PLN, serta layanan perbankan.

Masyarakat Desa Long Nawang sebagian besar bekerja sebagai petani sehingga keberadaan infrastruktur ekonomi sangat penting untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi hasil pertanian.

3.4.1 Infrastruktur Pendukung Ekonomi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan jaringan listrik PLN dan Bank BPD Kaltimara memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pembangunan PLBN juga membuka peluang peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas.

Table 4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Long Nawang

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	386
2	ASN	55

3	TNI/Polri	40
4	Pedagang	29
5	Penyedia Jasa	15

Sumber: Profil Desa Long Nawang Tahun 2023

3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Infrastruktur

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat.

3.5.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung pembangunan infrastruktur meliputi:

- a) Dukungan pemerintah pusat dan daerah.
- b) Adanya regulasi terkait pembangunan kawasan perbatasan.
- c) Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan.
- d) Posisi strategis Desa Long Nawang sebagai wilayah perbatasan negara.

3.5.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat pembangunan infrastruktur antara lain:

- a) Kondisi geografis yang sulit dijangkau.
- b) Cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi.
- c) Keterbatasan akses transportasi.
- d) Tingginya biaya distribusi material pembangunan.
- e) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang.

4. PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Long Nawang

Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan pada berbagai sektor, seperti infrastruktur perhubungan, perkantoran, sosial, ekonomi, dan produksi. Pembangunan tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perbatasan di Desa Long Nawang telah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020–2024. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta aksesibilitas masyarakat di kawasan perbatasan melalui pembangunan berbagai fasilitas dasar.

Menurut teori pembangunan yang dikemukakan oleh Rostow, pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju masyarakat yang lebih maju melalui tahapan-tahapan pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks penelitian ini, pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang menjadi salah satu indikator adanya proses perubahan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan menuju kondisi yang lebih baik. Infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.1 Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

Pembangunan infrastruktur perhubungan menjadi salah satu prioritas utama di Desa Long Nawang karena kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau. Berdasarkan hasil penelitian, akses transportasi menuju Desa Long Nawang masih mengalami berbagai kendala, terutama akses jalan darat yang belum memadai. Jalur transportasi darat masih bergantung pada jalan bekas perusahaan kayu yang kondisinya rusak dan sulit dilalui, terutama pada musim hujan.

Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan pembangunan jalan aspal sepanjang satu kilometer serta pembangunan beberapa jembatan untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Selain itu, akses transportasi udara melalui pesawat perintis juga menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menjangkau ibu kota kabupaten maupun daerah lainnya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Grigg dalam Kodoatie (2003) yang menyatakan bahwa infrastruktur merupakan sistem fasilitas dasar yang sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan dan transportasi yang baik akan memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur perhubungan juga berpengaruh terhadap penurunan tingkat keterisolasian masyarakat. Sebelum adanya pembangunan, masyarakat mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan pokok akibat tingginya biaya transportasi.

Dengan adanya peningkatan akses transportasi, distribusi barang menjadi lebih mudah meskipun belum sepenuhnya optimal.

4.2 Pembangunan Infrastruktur Perkantoran

Pembangunan infrastruktur perkantoran di Desa Long Nawang meliputi pembangunan kantor desa, kantor camat, kantor kepolisian, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya peningkatan pelayanan administrasi dan pemerintahan kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kantor pemerintahan memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan publik. Masyarakat tidak lagi harus pergi ke ibu kota kabupaten untuk mengurus berbagai administrasi pemerintahan karena sebagian pelayanan telah tersedia di desa.

Menurut teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Dalam penelitian ini, pembangunan fasilitas pemerintahan menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik di kawasan perbatasan.

Selain meningkatkan pelayanan administrasi, pembangunan PLBN juga memiliki fungsi strategis sebagai simbol kehadiran negara di wilayah perbatasan. Keberadaan PLBN Long Nawang memperkuat pengawasan wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

4.3 Pembangunan Infrastruktur Sosial

Pembangunan infrastruktur sosial di Desa Long Nawang meliputi pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana keagamaan. Berdasarkan hasil penelitian, desa telah memiliki fasilitas pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Selain itu, tersedia pula fasilitas kesehatan berupa UPTD Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pembangunan infrastruktur sosial memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses pendidikan yang lebih baik mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Temuan ini sesuai dengan pendapat Soekanto (2005) yang menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang direncanakan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi sosial yang sangat penting bagi pembangunan sumber daya manusia di wilayah perbatasan.

Selain pendidikan dan kesehatan, pembangunan sarana keagamaan juga berperan dalam memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan gereja dan mushola menjadi sarana pembinaan sosial serta mempererat hubungan antar masyarakat di Desa Long Nawang.

4.4 Pembangunan Infrastruktur Ekonomi

Pembangunan infrastruktur ekonomi di Desa Long Nawang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Infrastruktur ekonomi yang telah tersedia meliputi jaringan listrik PLN, fasilitas perbankan, dan fasilitas perdagangan masyarakat.

Keberadaan listrik PLN memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas usaha dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selain itu, adanya fasilitas perbankan membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Menurut Bappenas (2019), pembangunan wilayah perbatasan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan akses ekonomi. Dalam penelitian ini, pembangunan infrastruktur ekonomi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan.

Namun demikian, kondisi geografis yang sulit masih menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Tingginya biaya transportasi menyebabkan harga kebutuhan pokok dan material bangunan menjadi lebih mahal dibandingkan daerah perkotaan. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur transportasi masih perlu ditingkatkan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang secara optimal.

4.5 Pembangunan Infrastruktur Produksi

Pembangunan infrastruktur produksi di Desa Long Nawang berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Pemerintah desa berupaya mendukung kegiatan produksi masyarakat melalui pembangunan akses jalan pertanian dan penyediaan sarana pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Long Nawang bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur produksi sangat penting untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hudson (1997), infrastruktur merupakan sistem fasilitas publik yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks penelitian ini,

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara)

pembangunan infrastruktur produksi membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta memperlancar distribusi hasil produksi.

Pembangunan sektor produksi juga berkaitan erat dengan visi Desa Long Nawang yang menekankan pembangunan pertanian dan infrastruktur secara berkelanjutan. Dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan pendapatan serta menciptakan kemandirian ekonomi di wilayah perbatasan.

4.6 Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya dukungan pemerintah pusat dan daerah, regulasi yang mendukung pembangunan kawasan perbatasan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan.

Selain itu, keberadaan PLBN dan status wilayah sebagai kawasan strategis nasional juga menjadi faktor yang mempercepat pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan wilayah perbatasan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Sementara itu, faktor penghambat pembangunan meliputi kondisi geografis yang sulit, keterbatasan akses transportasi, cuaca, serta tingginya biaya distribusi material pembangunan. Hambatan tersebut menyebabkan proses pembangunan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan daerah lain.

Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sumber daya, serta kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur perbatasan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur perhubungan, perkantoran, sosial, ekonomi, dan produksi yang secara bertahap mampu meningkatkan aksesibilitas, pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan yang dilakukan juga telah mengacu pada berbagai regulasi pemerintah, khususnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah

Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020–2024. Keberadaan fasilitas seperti jalan, kantor pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam memperkuat pembangunan kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang. Faktor penghambat tersebut meliputi kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, keterbatasan akses transportasi darat, kondisi cuaca yang tidak menentu, tingginya biaya distribusi barang dan material pembangunan, serta belum meratanya sarana dan prasarana publik yang memadai. Selain itu, keterbatasan akses jalan keluar masuk wilayah perbatasan masih menjadi persoalan utama yang memengaruhi mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok. Sementara itu, faktor pendukung pembangunan antara lain adanya dukungan pemerintah pusat dan daerah, keberadaan regulasi pembangunan kawasan perbatasan, partisipasi masyarakat, serta potensi wilayah perbatasan sebagai kawasan strategis nasional.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar secara berkelanjutan, terutama akses jalan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih efektif antarinstansi pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan agar pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas kebijakan pembangunan perbatasan, dampak sosial ekonomi pembangunan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan negara.

6. DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Firdaus. (2018). Dampak kebijakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 109–122. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3881>
- Fetrushio, F. T. M., & Suprojo, A. (2019). Analisis pengaruh pembangunan Pos Lintas Batas Negara terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat perbatasan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2). Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Isan Daud. (2016). Kajian tentang pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Malinau. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 55–70. <http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id>
- Oktoriani. (2015). *Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi komparatif antara Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara)

Buku

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2011). *Grand design pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Indonesia tahun 2011–2025*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Badan Pembangunan Nasional. (2019). *Indikator sosial ekonomi daerah*. Badan Pembangunan Nasional.
- Hamdi, A. S. (2014). *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. Deepublish.
- Lahnisafitra, I. (2015). *Kajian pengembangan wilayah pada kawasan perbatasan Kalimantan Barat–Serawak*.
- Kecamatan Kayan Hulu. (2023). *Kecamatan Kayan Hulu dalam angka 2023*. Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.
- Muluk, K. (2012). *Membangun manajemen daerah perbatasan yang efektif*. Innovative Governance Seminar IAPA.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Analisis data kualitatif*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cetakan ke-26). Remaja Rosdakarya.
- Muharto, & Arisandy. (2016). *Pedoman wawancara penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muta'ali, L., et al. (2012). *Daya dukung lingkungan untuk perencanaan pengembangan wilayah*. Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Puspa, A. W. (2019, December 23). Tiga Pos Lintas Batas Negara dibangun di Kaltara. *Bisnis.com*. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20191223/407/1183983/tiga-pos-lintas-batas-negara-dibangun-di-kaltara>
- Santrock, J. W. (2007). *Sosial ekonomi*. Erlangga.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Dokumen / Peraturan

- Peraturan Bupati Malinau Nomor 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2021–2026.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020–2024.
- Profil Desa Long Nawang. (2023). *Profil Desa Long Nawang Tahun 2023*. Pemerintah Desa Long Nawang.